

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan bagi kehidupan manusia, demikian pula bagi kehidupan suatu bangsa. Untuk mencapai tujuan suatu bangsa, pendidikan memegang peranan yang cukup penting karena melalui pendidikanlah kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa dibentuk dan ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka suasana belajar dan proses pembelajaran harus direncanakan sedemikian rupa agar siswa secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya guna memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa maupun Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Berdasarkan penjelasan mengenai pendidikan bahwa yang harus dikembangkan dalam diri peserta didik adalah potensi-potensi yang ada pada dirinya, bukan berarti hanya memberikan ilmu kognitif semata tanpa mempertimbangkan potensi dalam hidup dan penghidupan selaku manusia yang memiliki keinginan, nafsu, akal dan naluri kemanusiaannya. Proses pengembangan potensi peserta didik terjadi dalam proses belajar dan

mengajar dilingkungan lembaga pendidikan formal dan nonformal, dan dalam proses tersebut terjadi interaksi antara guru sebagai pengajar dan peserta didik selaku subjek belajar dalam proses pembelajaran.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam kurikulum 2006. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diharapkan dapat menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengakomodasikan perkembangan baru dan perwujudan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka substansi dan nama mata pelajaran yang sebelumnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dikemas dalam Kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). (Permendikbud No.58 Tahun 2014).

Konsep Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan mempancasilakan warga negara Indonesia atau menciptakan manusia Indonesia yang Pancasila. Artinya menciptakan manusia Indonesia yang bertakwa, bersikap, dan bermoral Pancasila. Bermoral artinya suatu sikap perbuatan yang merupakan keharusan untuk dijalankan atau di ikuti, karena adanya tuntutan tertentu. Sikap diartikan dengan kecenderungan untuk

berbuat sesuatu. Sikap dipengaruhi oleh kognitif dan pengetahuan serta kebutuhan hidup seseorang. Tujuan penyajian konsep pembelajaran PPKn berkenaan dengan peningkatan kesadaran dan kemampuan diri pribadi seseorang peserta didik meliputi: a) Memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengertian yang benar. b) Meletakkan dan menanamkan pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 45, c) Menanamkan nilai moral Pancasila ke dalam diri seseorang peserta didik, d) Menggugah kesadaran seseorang peserta didik, e) Memberi dorongan agar dalam kehidupan sehari-harinya bertingkah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (Darmadi, 2013:25). Dari pernyataan tersebut, konsep pendidikan PPKn bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan diri peserta didik yang bermoral.

Pada hakekatnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan pembelajaran untuk menyiapkan peserta didik kelak sebagai warga Negara yang baik. Sehubungan dengan tujuan pendidikan nasional, maka pembelajaran PPKn pada pendidikan dasar dan menengah secara konseptual mengandung komitmen utama dalam pencapaian dimensi tujuan pengembangan kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Berdasarkan orientasi pada komitmen tersebut, maka peran dan fungsi serta tanggung jawab pembelajaran PPKn pada setiap jenjang pendidikan untuk mau dan mampu menjadikan para peserta didik sebagai warga negara yang baik. Adapun ciri-cirinya antara lain religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, sadar akan hak dan kewajiban, mencintai kebenaran dan keadilan, peka terhadap

lingkungan, mandiri dan percaya diri, sederhana, terbuka dan penuh pengertian terhadap kritik dan saran, patuh dan taat pada peraturan, kreatif, dan inovatif.

Menurut Nurul Zuriyah (2008:135) “Maraknya isu dari berbagai pihak menyoroti penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang belum dapat menghasilkan lulusan berkualitas, termasuk wawasan sikap dan perilaku. Tudingan akan rendahnya kualitas lulusan ini selalu saja mengarah pada kegagalan pembelajaran PPKn. Sebagai bukti dengan menunjukkan sikap dan perilaku tidak terpuji yang sedang menggejala, seperti perkelahian antar pelajar bahkan dengan sebagian anggota masyarakat, penodongan sampai penganiayaan dan pembunuhan, narkoba, penyelewengan seksual, perusakan lingkungan, dan sebagainya.”

Tujuan pendidikan adalah membentuk peserta didik yang bermoral.

Untuk membentuk peserta didik sebagaimana yang dimaksud tersebut bisa diwujudkan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sebab, pelajaran PPKn menitikberatkan pada pendidikan moral yang bermuara pada sikap disiplin, jujur, bertanggungjawab, sopan santun, pantang menyerah, dan yang lebih penting mencintai bangsa dan negaranya.

Di era globalisasi saat ini seiring kemajuan teknologi, nilai-nilai kesopanan, budi pekerti seakan telah diabaikan, yang mengakibatkan perilaku yang peserta didik menyimpang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimasyarakat. Hal ini dikarenakan degradasi moral. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Banyak anak dibawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, freesex, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya.

Apabila kita melihat pada kenyataannya didunia pendidikan banyak permasalahan yang sering muncul saat proses pembelajaran berlangsung, misalnya kurang sopan santunnya peserta didik, baik kepada guru maupun teman sebayanya, atau saat proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Kurang sopannya peserta didik, misalnya, ditunjukkan dengan tidak sopannya cara berpakaian, tidak sopannya cara berbicara, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang menanamkan moral siswa supaya terarah sehingga memungkinkan setiap nilai-nilai dalam Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan bisa dilaksanakan dalam kehidupan siswa sehari-hari terutama nilai-nilai yang terkandung dalam mata pelajaran PPKn.

Ada delapan sasaran bina warganegara dalam objek pendidikan moral Pancasila. Sehubungan dengan teori tersebut, peneliti mengaitkan peran pembelajaran PPKn dalam upaya pembinaan moral peserta didik di sekolah meliputi pembinaan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan peserta didik menjadi manusia yang cerdas, pembinaan peserta didik menjadi manusia yang trampil, pembinaan peserta didik menjadi manusia yang budi pekerti luhur, pembinaan peserta didik menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang kuat, pembinaan peserta didik menjadi manusia yang tebal semangat kebangsaannya, pembinaan peserta didik menjadi manusia yang mampu membangun dirinya sendiri, pembinaan peserta didik menjadi manusia yang bertanggung jawab atas pembangunan bangsanya. Serta sikap positif lainnya, didasarkan pada

pokok-pokok yang terkandung dalam nilai sila-sila Pancasila yang berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta adil. Yang kesemua nilai tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepribadian yang bermoral sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.(Daroeso,1986:51)

Warga negara yang bermoral merupakan warga negara yang mematuhi aturan yang berlaku di negaranya. Apabila disekolah maka aturan berupa tata tertib yang dapat dijadikan acuan, apakah peserta didik dapat menaati aturan-aturan tersebut. Penulis melakukan observasi di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto yang merupakan Sekolah kejuruan terletak di jalan Yos Sudarso Purwokerto Barat. Melalui wawancara dengan Guru PPKn yang juga sebagai wakil kepala bidang kesiswaan Kamis 20 November 2014, yang sebelumnya sudah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto. Menurutnya beberapa permasalahan erkait moral antara lain tidak masuk sekolah tanpa alasan atau membolos, terlambat sekolah, melakukan tindakan penipuan yaitu pemalsuan kwitansi pembayaran, tidak mengikuti ekstrakurikuler, tidak mengikuti pelajaran, tidak mengerjakan tugas, tidak tertib dalam mengikuti upacara bendera, berpakaian seragam tidak lengkap atau tidak semestinya, mengucapkan kata-kata tidak sopan, pencemaran nama baik, sampai melakukan hubungan asmara yang belum sepatasnya. Berikut ini merupakan beberapa data terkait pelanggaran moral di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto.

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Moral peserta didik SMK Muhammadiyah 1
Purwokerto 2013-2014

No	Jenis Pelanggaran	Tahun 2012/2013 314 siswa		Tahun 2013/2014 319 siswa		Tahun 2014/2015 339 siswa	
		Frekuensi	Presentase (%)	Frekuensi	Presentase (%)	Frekuensi	Presentase (%)
1	Melanggar sopan santun, seperti: berkata tidak sopan, melakukan provokasi, bermain HP saat KBM	10	3,18 %	12	3,76%	15	4,42 %
2	Melanggar tata tertib sekolah seperti: Terlambat masuk sekolah, membolos, berseragam tidak lengkap.	68	21,6%	72	21,5%	80	23,5%
3	Melanggar terkait tindak kriminal: Mencuri barang milik sekolah, Penipuan/memalsu bukti pembayaran, melakukan hubungan asmara tindak asusila, tawuran	4	1,27%	7	2,19%	10	2,9%

Sumber: Data Bimbingan Konseling (BK) SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto

Berdasarkan data pelanggaran moral di atas menunjukkan perlu adanya upaya pembinaan moral melalui pembelajaran PPKn. Dengan demikian penulis meneliti mengenai bagaimanana Peran pembelajaran PPKn dalam pembinaan moral peserta didik di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto.

Penelitian ini sangat penting dalam menanamkan dan membina moral peserta didik. Supaya peserta didik dapat menjadi pribadi yang bermoral baik sesuai dengan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yakni menjadikan warga negara Indonesia sebagai warga negara yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, secara umum masalah yang menjadi inti penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya Pembinaan moral peserta didik di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto. Dari rumusan masalah tersebut, peneliti kemudian merinci menjadi tiga sub masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya pembinaan moral peserta didik di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto?
2. Apa saja yang menjadi kendala pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya pembinaan moral peserta didik di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya pembinaan moral peserta didik di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data informasi mengenai pembelajaran PPKn dalam upaya pembinaan moral peserta didik SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya pembinaan moral peserta didik di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya pembinaan moral peserta didik di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya pembinaan moral peserta didik di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan pembelajaran dan memperkaya kajian tentang peranan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya pembinaan moral peserta didik serta sebagai literatur dan bahan

pemikiran lebih lanjut bagi mereka yang berminat meneliti masalah yang sama.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada:

a. Bagi peserta didik

- 1) Dapat memperluas pengetahuan peserta didik tentang kesadaran moral
- 2) Meningkatkan motivasi peserta didik dalam memahami moral.
- 3) Meningkatkan kesadaran moral peserta didik melalui proses pembelajaran PPKn.

b. Bagi Guru

- 1) Sebagai masukan dan bahan untuk mempertimbangkan dan meningkatkan pembinaan moral dalam mata pelajaran PPKn.
- 2) Membantu dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan
- 3) Dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan pembelajaran PPKn.

c. Bagi Sekolah

- 1) Menambah dan meningkatkan pengetahuan tentang pembinaan moral pada sekolah tersebut.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau kontribusi yang positif bagi sekolah atau sebagai umpan balik pentingnya pembinaan moral peserta didik di sekolah.

d. Bagi Prodi PPKn

- 1) Menjadi masukan untuk kepentingan pembelajaran PPKn di FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto terutama yang berkaitan dengan Pembinaan moral dalam pembelajaran PPKn.
- 2) Memberikan pemahaman dan tambahan materi untuk dipelajari dan dipahami pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

e. Bagi peneliti

- 1) Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pembinaan moral peserta didik dalam pembelajaran PPKn.
- 2) Sebagai bekal nantinya bagi peneliti dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik.